BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

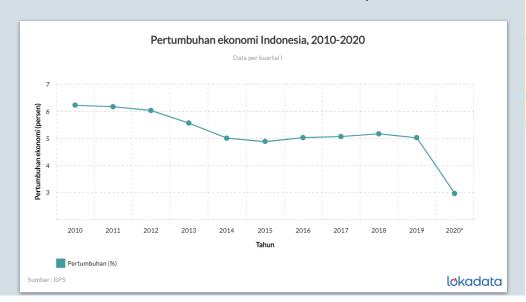
Pembangunan suatu negara termasuk Negara Indonesia keberhasilannya dapat dinilai dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Mahaeni et al., 2014). Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro dan biasanya diukur dari capaian-capaian perkembangan dari periode 1 ke periode berikutnya. Menurut Sukirno (Sukirno, 2006), Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi di setiap Negara dunia agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Sanusi, dkk (Sanusi et al., 2014) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat terjadi jika tidak didorong dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu tolok ukur yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi karena hal ini menggambarkan aksi nyata dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan (Lebang et al., 2017).

Pertumbuhan ekonomi, yang didefinisikan sebagai perbedaan antara output internal satu tahun dan tahun sebelumnya, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan. Strategi pembangunan yang dijalankan, merupakan salah satu faktor utama untuk mengukur efektivitas pembangunan ekonomi (D. N. Sari et al., 2017). Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan

ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu metrik yang paling penting untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan kekayaan yang lebih besar bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu karena kegiatan ekonomi memerlukan penggunaan berbagai mode produksi untuk membuat barang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah juga penting termasuk saat membuat rencana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga saat menghimpun dana yang digunakan untuk keperluan investasi supaya pertumbuhan ekonomi meningkat.

Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2020 Pertumbuhan ekonomi Indonesia, 2010-2020



Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 yakni 2,97 persen. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi ini cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan bahkan resesi ini sejak tahun 2020 benarbenar menimbulkan efek di banyak bidang kehidupan (Ahmad, 2022). Dampak langsung terhadap perekonomian ini awalnya terjadi sebagai dampak dari kebijakan pemerintah, khususnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah perkotaan Indonesia yang berlangsung pada awal April 2020. Menurut data dari Bank Indonesia pada tahun 2020, sektor ekonomi nasional yang paling terkena dampak adalah sektor pariwisata dan sektor turunannya. Sektor transportasi, otomotif dan manufaktur juga merasakan dampak langsung darikebijakan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional.sektor ekonomi di Indonesia yang menyebabkan banyak pengangguran di Indonesia.

Provinsi Jawa Barat memiliki perbedaan karakteristik antar wilayahnya baik sosial, ekonomi, dan juga sumber daya alam yang penyebarannya berbeda pada setiap wilayah. Hal ini berepngaruh pada pemerataan pembangunan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah menjadi lebih tinggi dikarenakan terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.

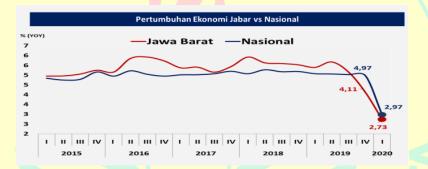
Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Enam Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2020 (dalam persen)

	2016 – 2020 (dalam persen)							
No.	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020		
1	DKI Jakarta	5,85	6,20	6,17	5,89	-2,39		
2	Jawa Tengah	5,28	5,27	5,32	5,41	-2.65		
3	Jawa Barat	5,67	5,33	5,66	5,07	-2.53		
4	Jawa Timur	5,57	5,46	5,50	5,52	-2.33		
5	DI Yogyakarta	5,05	5,26	6,20	6,60	-2.68		
6	Banten	5,26	5,75	5,82	5,53	-3.39		
7	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07		

Sumber: Data diolah oleh simreg.bappenas.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, Jawa Barat dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten pada tahun 2015 termasuk dalam daerah yang lambat dan pada tahun 2016 dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat juga termasuk daerah yang lambat. Jawa Barat pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten juga termasuk dalam daerah yang lambat. Pada tahun 2018 Jawa Barat juga termasuk daerah yang lambat jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dibandingkan dengan DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten juga termasuk dalam daerah yang lambat, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami penurunan yang cukup jauh,

Pada Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan laju pertumbuhan yang cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh pelemahan di sektor pengeluaran, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Konsunsi IRT, Ekspor LN, Konsumsi Pemerintah, Impor LN, dan (PMTB) (Herawanto, 2020). Dan fakta yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomim Jawa Barat Menurut Bank Indonesia 2015-2020
Sumber: data diolah oleh Bank Indonesia (Herawanto, 2020)

Sudah seharusnya pertumbuhan ekonomi menujukkan angka yang meningkat dari tahun ke tahun untuk memacu juga menggerakan pembangunan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dibutuhkan untuk mempercepat perubahan dalam struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang stabil dan dinamis.

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari tenaga kerja dalam suatu wilayah. Pertumbuhan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling dominan. Karena sumber investasi yang ada tidak akan bergerak tanpa adanya tenaga kerja. Namun, disisi

lain hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi perekonomian suatu daerah jika pertumbuhannya sangat tinggi, yang akan memunculkan permasalahan baru yaitu diperlukannya perluasaan lapangan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Menurut Suwanti dan Gunanto (Suwanti & Gunanto, 2013), pertumbuhan ekonomi pada sistem pemerintahan daerah dapat di indikasikan dengan peningkatan produksi barang serta jasa yang kemudian diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika terjadi peningkatan PDRB ini berarti ekonomi bergerak dan berekspansi sehingga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Samuelson (Mance, 2020) juga berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan PDRB atau output potensial suatu negara, dan indikator perkembangan PDB dari tahun ke tahun dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika tingkat kegiatan ekonomi saat ini lebih tinggi dari sebelumnya, maka perekonomian berjalan dengan baik.

Sadono Sukirno (Sukirno, 2016), masyarakat dapat terus meningkatkan kemungkinan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tiga jenis kegiatan investasi dasar dalam perekonomian digunakan untuk menciptakan pekerjaan ini. Salah satunya adalah bahwa investasi termasuk dalam semua biaya. Permintaan agregat dan pendapatan nasional akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan investasi. Peningkatan inflasi ini akan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja.

Salah satu faktor yang tak kalah penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah akumulasi modal atau investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Investasi diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai stok modal seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Tergantung pada tingkat produktivitasnya, semakin banyak tabungan yang lalu di investasikan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 2 Perkembangan Realisasi PMA & PMDN di Provinsi Jawa Barat

Tahun	PMA (US\$ Ribu)	PMDN (Rp. Juta)
2015	5,738,714.3	26,272,867.8
2016	5,470,854.9	30,360,209.6
2017	5,142,948.5	38,390,637.9
2018	5,573,518.0	42,278,211.6
2019	5,881,046.4	49,431,191.3
2020	4,970,000.0	51,400,000.5

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, penanaman modal asing maupun modal dalam negeri mengalami fluktuasi. Penanaman modal dalam negeri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 26,272,867.8 (Juta Rp), pada tahun 2020 sebesar 51,400,000.5 (Juta Rp) dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Sedangkan penanaman modal asing mengalami fluktuasi tiap tahunnya, tahun 2016 adalah mengalami penurunan yang paling besar dalam kurun waktu 2015-2020 sebesar 911.046,4 (Juta Rp). Melihat tabel di atas. Jawa

Barat perlu meningatkan investasi dan untuk menciptakan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal itu didasari oleh keinginan kuat oleh Gubenur Jawa Barat dan membuat investasi yang lebih merata, karena investasi yang lebih merata mampu menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena faktanya investasi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tidak merata di setiap daerah, karena tidak disetiap Kabupaten atau Kota terdapat nilai investasinya.

Peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk inisiatif pembangunan baik di sektor ekonomi maupun non-ekonomi sangat terkait dengan kemajuan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah adalah biaya proyek-proyek ini (Karya & Syamsuddin, 2016). Pengeluaran pemerintah dapat didefinisikan sebagai penggunaan dana dan sumber daya tanah untuk membiayai suatu negara atau kegiatan pemerintah agar pemerintah dapat memenuhi perannya dalam pengelolaan mata pencaharian.

Karena akan mampu membangun jenis infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan, pengeluaran pemerintah ini akan berdampak pada kegiatan ekonomi. Dana Pendapatan Pusat (Pendukung Utama) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan menjadi tujuan bagi semua daerah di Indonesia. Namun, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka peneliti tertarik untuk

membahas mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten / Kota di Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasikan beberapa masalah, yakni:

- 1. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
- 2. Apakah terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
- 3. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, pertumbuhan ekonomi memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Karena peneliti memiliki keterbatasan baik dari segi dana, waktu dan tenaga, maka peneltian ini dibatasi pada masalah "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015-2020"

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?

- 2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
- 3. Apakah terdapat pengaruh yang simultan antara Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan dapat dipercaya tentang :

- Mengetahui pengaruh Invetasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi khususnya pada Kabupaten/kota di Jawa Barat
- 2. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi khususnya pada kabupaten/kota di Jawa Barat
- 3. Mengetahui pengaruh secara bersamaan Investasi dan Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

F. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai bahan informasi bagi semua pihak

dan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu ekonomi terutama mengenai pertumbuhan ekonomi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bagian dalam proses belajar dan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari semasa perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata,
- b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan atau bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan agar masyarakat mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah dan investasi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi dan referensi dalam penelitian selanjutnya.